

# **REFORMULASI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH SEBAGAI ALTERNATIF PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL**

**Hatta Fakhrurozi**

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu

**Abstract:** Social conflict happened lately shows the failure of formal education in facilitating students to have life competences. Formal education as institution has failed to transferred universal education values in to every single person of students. This fact happened because formal education has only focused on intellectual development or cognitive materials. Students considered successful if they achieve a certain standar academic scores in every lesson, also called minimal graduate standar score (SKM). The aim of education set by a government in National education system laws could not be reached totality, even a half, by educational institutions in Indonesia. Indeed, the competency standards that propagated by government lately trough National education system laws never touch students affective and behavior, moreover spiritual aspect.

**Abstrak:** Fenomena konflik sosial dewasa ini menunjukkan kegagalan pendidikan formal dalam memberikan bekal kecakapan hidup kepada masyarakat. Pendidikan formal sebagai lembaga pendidikan gagal dalam mentransfer nilai-nilai pendidikan universal ke dalam pribadi peserta didik. Hal ini dikarenakan fokus pendidikan formal selama ini hanya pada materi-materi intelektual atau kognitif saja. Peserta didik dianggap berhasil jika telah mencapai standar nilai akademik tertentu dalam suatu mata pelajaran, biasa disebut dengan standar kelulusan minimal (SKM). Tujuan pendidikan yang ditetapkan Pemerintah dalam UU Sisdiknas tidak mampu dicapai secara keseluruhan, atau bahkan separoh, oleh lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Bahkan standar kompetensi yang selama ini dipropagandakan oleh pemerintah melalui UU Sisdiknas tidak mampu menyentuh aspek afektif dan perilaku peserta didik, apalagi aspek spiritual.

**Kata kunci:** Pendidikan Luar Sekolah, konflik sosial, kekerasan sosial, Sisdiknas

## Pendahuluan

Beberapa dekade terakhir Indonesia dimarakkan dengan munculnya kerusuhan dan konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik yang terjadi di Indonesia berujung pada kekerasan sosial. Ironisnya, beberapa contoh seperti kerusuhan di Poso, Ambon, Maluku, Aceh dan daerah-daerah lain, dilanjutkan dengan maraknya aksi terorisme. Kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah tersebut berdampak tidak hanya pada daerah itu sendiri, melainkan juga pada daerah sekitarnya. Tidak hanya kerugian materi yang diderita bangsa ini, kerugian imateri seperti hilangnya rasa nyaman, munculnya rasa khawatir karena tidak ada jaminan keamanan, saling mencurigai karena kurangnya rasa saling percaya, dan semisalnya juga diderita oleh masyarakat Indonesia. Dampak negatif kerusuhan tersebut juga merembet pada terganggunya sistem pendidikan dan aktivitas ekonomi masyarakat; belum terhitung rusaknya hubungan-hubungan sosial, kekerabatan dan kemanusiaan yang selama ini menjadi referensi bersama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Kerusuhan-kerusuhan tersebut tidak hanya berdampak regional, tetapi lebih luas lagi, kerusuhan tersebut juga berdampak Nasional.

Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa kekerasan komunal dan separatis merupakan kategori kekerasan sosial yang menimbulkan persentase korban tewas terbesar, masing-masing 77% dan 22%. Terdapat kecenderungan bahwa baik jumlah insiden maupun korban tewas mengalami peningkatan yang signifikan pada fase transisi dengan puncaknya sekitar tahun 1999-2000. Dilihat dari distribusi spasialnya, kekerasan sosial di Indonesia ternyata cenderung lebih banyak terjadi di kawasan kota-kota kecil/kabupaten dibandingkan dengan di kota-kota besar. Di antara kekerasan komunal, *ethnic-religion-migration related violence* merupakan sub-kategori terbesar yang menyebabkan korban tewas. Sekitar 52% korban tewas dalam seluruh kekerasan sosial terjadi dalam sub-kategori ini<sup>1</sup>.

Studi mengenai korban kekerasan/kejahatan sebagai fokus perhatian sebenarnya telah mendorong masyarakat dan negara guna lebih memperhatikan dan menyadari betapa pentingnya melindungi hak-hak dan memahami korban menurut perspektif korban. Kendati demikian, hal terpenting yang perlu dicatat bahwa betapa banyak korban berjatuh akibat tindak kekerasan, tetapi mereka luput dari

---

<sup>1</sup> Mohammad Zulfan Tadjoeidin, *Anatomi Kekerasan Sosial Dalam Konteks Transisi: Kasus Indonesia 1990-2001*, (Jakarta: UNSFIR, 2002), h. 2.

perhatian negara dan masyarakat karena hukuman terhadap pelaku misalnya tidak memberi rasa keadilan bagi korban. Kekerasan (*violence*) adalah suatu tindakan yang menyakitkan atau tindakan penyerangan yang menimbulkan luka, trauma, dan penderitaan yang berkepanjangan terhadap korban.

Beberapa sosiolog berpendapat bahwa munculnya berbagai konflik dan kekerasan dalam masyarakat belakangan ini merupakan wujud dari proses demokratisasi atau pendewasaan politik. Pendapat ini dikuatkan oleh Snyder (2000) yang menyatakan bahwa tahap-tahap awal demokratisasi suatu negara akan sangat rentan terhadap pecahnya konflik komunal. Selengkapnya, ia menuliskan kesimpulan sebagai berikut:

*“The developing countries’ recent experiences with nationalist conflict run parallel to those of the historical European and the contemporary post-communist states. Democratization increases the risk of nationalist and ethnic conflict in the developing world, but the strength and outcome of this propensity varies in different circumstances. Nationalist and ethnic conflicts are more likely during the initial stages of democratizations than in transitions to full consolidations of democracy. More over, trouble is more likely when elites are highly threatened by democratic change (as in Burundi, the former Yugoslavia, and the historical Germany) than when elites are guaranteed a satisfactory position in the new order (as in historical Britain, and in much of South Africa and East and Central Europe today). Uncontrolled conflict is more likely when mass participation increases before civic institutions have been extensively developed, as the contrast between Burundi and South Africa suggests. Similarly, ethnic conflict is more likely when the civic institutions of the central state break down at a time of rising popular demands, as in India in the late 1980s and 1990s. Finally, ethnic conflict is more likely when the channels of mobilizing mass groups in to politics are ethnically exclusive...”<sup>2</sup>*

Proses demokratisasi atau pendewasaan politik adalah peristiwa yang lazim terjadi pada setiap negara. Namun, proses

---

<sup>2</sup> Snyder, Jack, *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*, (New York: W.W. Norton & Company, 2000), h.. 310.

tersebut tidak harus dihiasi dengan terjadinya kekerasan dan konflik sosial, apalagi yang mengakibatkan korban jiwa.

Konflik dalam kehidupan manusia sebenarnya adalah fenomena yang sangat alamiah. Persoalannya terletak pada masalah apakah ia menimbulkan aksi kekerasan atau tidak. Kekerasan bisa dilihat sebagai manifestasi dari suatu konflik yang tidak terlembaga (*un-institutionalized conflict*), sementara keadaan sebaliknya, yaitu konflik yang terlembaga dengan baik (*institutionalized conflict*), akan dapat diselesaikan melalui cara-cara yang damai. Setidaknya terdapat dua tipe kekerasan, yang bersifat personal dan yang bersifat kolektif atau sosial. Kekerasan personal berakar pada konflik personal, sementara kekerasan sosial umumnya berakar pada konflik sosial. Kekerasan sosial memiliki implikasi ekonomi, dan sosial-politik yang jauh lebih luas dibanding kekerasan personal. Objek dari studi ini adalah kekerasan yang bersifat sosial/kolektif, yaitu kekerasan sosial. Insiden yang kelihatannya berupa kekerasan personal, tetapi berakar kuat pada suatu konflik sosial, dimasukkan ke dalam kategori kekerasan sosial. Kasus seperti ini acapkali terjadi di Aceh, Poso, Maluku dan beberapa daerah lain di Indonesia, begitu banyak insiden kekerasan yang secara kasat mata bisa dikatakan termasuk kategori personal, seperti seseorang ditembak oleh seorang lainnya tanpa melibatkan banyak orang. Tetapi kita paham bahwa aksi-aksi kekerasan semacam ini di Aceh dan Poso berakar kuat pada masalah gerakan separatis yang sejak lama eksis di propinsi ini.

Penulis merasa perlu membuat definisi yang jelas dan sederhana mengenai apa yang dimaksud dengan ‘kekerasan sosial’ yang digunakan dalam tulisan ini. Sebenarnya, ‘kekerasan sosial’ sangat erat kaitannya dengan ‘konflik sosial’, dimana kedua terminologi ini –yang akan banyak digunakan pada bagian berikutnya– mengacu pada hal yang sama. Tetapi, akan dibuat sedikit pembedaan yaitu bahwa kekerasan sosial lebih merujuk pada bentuk fisik atau wujud nyata dari aksi yang dilakukan sekelompok orang atau massa pada suatu waktu dan tempat tertentu, seperti perusakan, pembunuhan, penjarahan, penyerangan, pembakaran, tawuran, penyanderaan dan aksi-aksi kekerasan lainnya.

Sementara konflik sosial lebih mengacu pada permasalahan yang lebih mendasar dari munculnya suatu aksi kekerasan sosial, seperti ditulis Ocorandi ketika menganalisa kerusuhan akibat kelangkaan bahan pokok di awal tahun 1998 sebagai berikut: “*Riots are a symptom of a deeper problem.*” Dalam hal ini *riots* (kerusuhan)

adalah aksi kekerasan sosial, sementara *deeper problem* (permasalahan yang lebih dalam) itu adalah konflik sosial, yaitu perbedaan ras yang diiringi oleh ketimpangan sosial ekonomi antara penduduk pribumi dan etnis keturunan Cina. Sehingga, dapat dikatakan bahwa, acapkali kekerasan sosial merupakan manifestasi dari konflik sosial, dan seringkali diadopsi sebagai cara berkonflik, walau tidak semua konflik sosial bermuara pada suatu kekerasan sosial<sup>3</sup>.

Analisa tersebut dalam satu sisi dapat dibenarkan, bahwa konflik sosial biasanya dipicu oleh kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan ekonomi yang berbanding lurus dengan minimnya lapangan pekerjaan merupakan sepasang penyebab timbulnya konflik sosial. Namun, dewasa ini, agaknya asumsi tersebut tidak menjadi kendala yang berarti. Berbagai konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Lampung, Madura, Palu, Poso, Maluku, Papua, dan daerah-daerah lainnya tidak muncul karena kesenjangan ekonomi. Beberapa daerah tersebut mayoritas berpenduduk yang memiliki kesenjangan ekonomi rendah, tetapi konflik sosial yang terjadi selalu berujung dengan kekerasan sosial. Tentunya, diperlukan kajian khusus untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik dan kekerasan sosial di daerah-daerah tersebut.

Dampak dari kekerasan sosial belakangan ini yang tidak kalah pentingnya untuk segera ditanggulangi adalah hilangnya rasa nyaman dalam hidup bermasyarakat. Munculnya sifat dan sikap *heterofobia* dalam masyarakat akan berdampak buruk pada perkembangan masyarakat itu sendiri, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan keamanan. *Heterofobia* atau yang lazim dikenal sebagai takut pada hal-hal baru atau asing merupakan penyakit sosial yang berdampak pada sikap *introvert* dalam masyarakat. Tentunya, diperlukan upaya khusus baik dari kalangan pemerintah pusat maupun daerah setempat dan para pemangku kebijakan untuk merumuskan model terapi sosial guna *me-recovery* kesehatan psikis dan mental dari masyarakat sekitar.

---

<sup>3</sup> Ocorandi, Michael (1998), "An Anatomy of The Recent Anti Ethnic-Chinese Riots in Indonesia", <http://www.huaren.org/focus/id/032598-1.html>. diakses pada 23 Agustus 2013.

## **Pendidikan di Indonesia**

Pendidikan disamping sebagai proses transfer pengetahuan, juga berfungsi sebagai sarana transformasi dan regenerasi kehidupan sosial. Setiap Negara maupun propinsi memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda, bahkan di daerah maupun komunitas tertinggal yang tidak mempunyai lembaga pendidikan formal pun memiliki sistem pendidikan tersendiri sebagai proses transfer dan transformasi pengetahuan dan kebudayaan. Setiap anak manusia dilahirkan di dalam suatu habitus kebudayaan dalam masyarakat lokalnya. Masyarakat lokal berdasarkan tradisi mempunyai mekanisme di dalam mendidik calon anggotanya<sup>4</sup>. Sistem pendidikan tersebut menjadi ciri khas dari model pendidikan yang diterapkan pada suatu daerah.

Pendidikan merupakan Amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat diartikan bahwa pendidikan mutlak diselenggarakan pada setiap lini kehidupan masyarakat. Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan Negara sebagai pemangku amanat tersebut wajib menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai guna meningkatkan kualitas bangsa. Pendidikan menjadi instrumen untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang cerdas dan berkualitas yang pada akhirnya akan mampu memajukan bangsa. Namun tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyelenggarakan pendidikan, baik melalui jalur formal, non formal maupun informal.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 13, memuat jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Ketiga jalur pendidikan tersebut satu kesatuan sub sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Lebih khusus lagi pada pasal 26, ayat 2 dinyatakan bahwa pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, yang berbarti bahwa pendidikan non formal mendapatkan keleluasan untuk mengembangkan SDM masyarakat dan memasyarakatkan budaya belajar dalam memperkuat dan meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan yang berguna

---

<sup>4</sup> H.A.R. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional; Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2005), h. 113

untuk kehidupan masyarakat. Selanjutnya, ayat 3 menyatakan, bahwa pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Program-program tersebut dikuatkan lagi dengan wadah lembaga pendidikan non formal seperti dinyatakan pada ayat 4, bahwa satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat,<sup>5</sup> dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis<sup>6</sup>.

Upaya pemerintah melalui UU Sisdiknas tersebut memberikan ruang gerak kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pendidikan Luar Sekolah (selanjutnya disebut PLS) adalah suatu institusi pendidikan yang bergerak dan bekerja di luar sistem persekolahan formal dalam masyarakat. Gagasan menggulirkan PLS ini timbul karena luasnya sasaran layanan, kompleksitas permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat. Hal ini menyadarkan dan menyemangati pelaku pembangunan untuk melakukan berbagai upaya pembelajaran masyarakat yang berpangkal pada masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, berada dalam lingkungan masyarakat dan bermakna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini

---

<sup>5</sup> Dalam praktiknya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) didesain sebagai tempat belajar yang lebih fleksibel. Tidak terlalu ketat waktu terhadap pelaksanaan pembelajaran. PKBM didirikan oleh masyarakat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Fungsi PKBM selain sebagai pusat tempat pembelajaran, juga sebagai wadah berdirinya Taman Baca Masyarakat (TBM). Integrasi tempat tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat untuk membudayakan membaca. Lihat <http://www.bit.lipi.go.id/masyarakat-literasi/index.php/minat-baca/74-peran-pendidikan-luar-sekolah-dalam-pembangunan-sdm-dan-pemasyarakatan-budaya-baca>, diakses pada tanggal 17 Januari 2013.

<sup>6</sup> UU No. 20 Tahun 2003 juga menghapus *stereotype* yang selama ini berkembang bahwa lulusan yang diakui dalam dunia pendidikan dan dunia kerja hanyalah output dari jalur pendidikan formal saja. Melalui ujian penyetaraan, siswa yang menempuh jalur pendidikan non formal dan informal dapat memperoleh ijazah atau sertifikat setara yang didapat dari jalur pendidikan formal. Ijazah tersebut dapat digunakan dalam dunia kerja atau pendidikan, misalnya digunakan untuk menempuh jalur pendidikan yang lebih tinggi.

digunakan agar dalam setiap penyelenggaraan program pembelajaran masyarakat senantiasa dalam koridor pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan pendidikan saat ini mengalami perubahan sistem yang mendasar. Pembangunan pendidikan kita tidak bisa dilepaskan dari pembangunan secara utuh. Pendidikan harus memberikan sumbangan bagi pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu pendidikan harus mampu merubah struktur masyarakat yang statis ke arah sistem sosial yang dinamis. Pendidikan harus mempengaruhi, merombak, mengubah, dan membentuk lembaga-lembaga sosial-kultural. Pendidikan harus mendorong sikap individual ke arah efektivitas, integritas, dan sikap komunal ke arah rasionalitas dan fungsional. Sehingga pendidikan mampu berpengaruh secara inovatif terhadap kondisi-kondisi kemasyarakatan yang menghambat perkembangan pembangunan. Oleh karena itulah pembangunan pendidikan merupakan bagian sistem pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian kebijakan mengenai pendidikan selalu terkait dengan kebijakan pembangunan nasional.

Kebijakan pembangunan nasional melalui Undang-Undang No 22 tahun 2000, mengamanatkan adanya perubahan yang mendasar akan sistem pemerintahan, yaitu dari sentralisasi menjadi otonomi daerah. Kebijakan ini berimplikasi secara meluas juga pada bidang pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan juga diarahkan pada desentralisasi pendidikan atau otonomi pendidikan. Otonomi pendidikan memberi peluang berkembangnya program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Pemerintah pusat sebagai lembaga pemerintah hanya berfungsi sebagai pembuat standar, pedoman, pemantau dan fasilitator untuk memaksimalkan semua potensi daerah masing-masing.

Otonomi pendidikan pada dasarnya adalah usaha mendekatkan pengambilan keputusan program terhadap sasaran program, upaya untuk memberdayakan masyarakat pada skala mikro dengan tingkat pengambilan keputusan program pada level sasaran program. Tidak lagi pemerintah pusat intervensi dalam mengembangkan program. Pemerintah daerah seharusnya melakukan perencanaan pendidikan dengan berdasarkan asumsi potensi dan masalah yang ada di masyarakatnya. Peran Pemerintah daerah Kab/Kota dalam mengelola pendidikan sangat menentukan keberhasilan programnya.



## **Pendidikan Luar Sekolah**

Istilah pendidikan luar sekolah sebenarnya telah lama dikenal dalam masyarakat. Secara historis, pendidikan luar sekolah muncul sebelum pendidikan formal, yang dikenal dengan istilah pendidikan non formal. Dalam praktiknya, pendidikan luar sekolah didirikan oleh masyarakat secara swadaya dengan materi-materi pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Beberapa istilah operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendidikan Luar Sekolah dan Konflik sosial.

Ibnu Syamsi menyebutkan bahwa Pendidikan luar sekolah adalah suatu institusi pendidikan yang bergerak dan bekerja di luar sistem persekolahan formal dalam masyarakat. Organisasi pendidikan luar sekolah harus mampu cair dan luluh dalam masyarakat untuk memberdayakan masyarakat terutama kelompok pengangguran perkotaan, dalam rangka mengejar ketertinggalan-ketertinggalan dengan masyarakat alain. Dengan demikian pendidikan luar sekolah akan selalu mengadakan inovasi-inovasi secara kreatif dalam masyarakat untuk memberdayakannya, dan mengembangkan sumber daya dalam masyarakat tersebut<sup>7</sup>.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Adikusumo mengemukakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dimana seseorang memperoleh informasi-informasi pengetahuan, latihan ataupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap-sikap peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga bahkan masyarakat dan negaranya<sup>8</sup>.

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah

---

<sup>7</sup> Ibnu Syamsi, "Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Pemberdaya dalam Masyarakat" dalam *DIKLUS; Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, vol. 14 No. 1 (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2010), h. 64-65.

<sup>8</sup> Soepardjo Adikusumo, *Pendidikan Kemasyarakatan*, (Bandung: FPS-IKIP, 1986), h. 57.

menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri<sup>9</sup>.

Sementara itu, konflik sosial bisa diartikan menjadi dua hal. Pertama, perspektif atau sudut pandang yang menganggap konflik selalu ada dan mewarnai segenap aspek interaksi manusia dan struktur sosial. Kedua, konflik sosial merupakan pertikaian terbuka seperti perang, revolusi, pemogokan, dan gerakan perlawanan. Soerjono Soekanto menyebutkan konflik sebagai pertentangan atau pertikaian, yaitu suatu proses individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan, disertai dengan ancaman dan atau kekerasan<sup>10</sup>.

#### *Peran Pendidikan Luar Sekolah*

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam pendidikan formal, menyebabkan pendidikan luar sekolah mengambil peran untuk membantu sekolah dan masyarakat dalam mengurangi masalah tersebut. Sudjana mengemukakan peran pendidikan luar sekolah adalah sebagai “pelengkap, penambah, dan pengganti”<sup>11</sup>.

#### *Sebagai pelengkap pendidikan sekolah*

Pendidikan luar sekolah berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Isi program didasarkan atas kebutuhan peserta didik. program dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan dan bekerja sama dengan masyarakat. Programnya bermacam-macam, seperti pendidikan keterampilan produktif, olah raga, kesenian, kelompok belajar, kelompok rekreasi dan kelompok pencinta alam. Pendidikan luar sekolah sebagai pelengkap ini dirasakan perlu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi pendidikan sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu

---

<sup>9</sup> Dikutip oleh Septya Anggraini, “Pendidikan dan Konflik Sosial di Sekolah”, dalam <http://septyangraeni.wordpress.com/2013/01/06/pendidikan-dan-konflik-sosial-di-sekolah/>, diakses tanggal 1 September 2013.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru 1989), h. 107.

program-program PLS pada umumnya dikaitkan dengan lapangan kerja dan dunia usaha seperti latihan keterampilan kayu, tembok, las, pertanian, makanan, dan lain-lain.

*Sebagai penambah pendidikan sekolah*

Pendidikan luar sekolah sebagai penambah pendidikan sekolah bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar kepada:

- Peserta didik yang ingin memperdalam materi pelajaran tertentu yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah. Kegiatan belajar tambahan ini dilakukan di luar jam pelajaran dengan menggunakan ruang kelas di sekolah yang bersangkutan atau ditempat lain. Materi pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan para siswa. Para pendidik pada umumnya adalah guru-guru mata pelajaran yang bersangkutan sangkutan atau sumber belajar lain yang ada di masyarakat.
- Alumni suatu jenjang pendidikan sekolah dan masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas materi pelajaran yang telah diperoleh. Kebutuhan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu : 1) Memperluas materi pelajaran yang telah diperoleh untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kebutuhan ini biasanya dilakukan melalui bimbingan studi, bimbingan tes, kursus-kursus dan kelompok belajar; 2) Menambah pengetahuan tentang materi belajar yang dirasakan penting sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat. Kebutuhan ini dilakukan melalui kursus-kursus, diskusi, seminar lokakarya, penelitian dan studi kepustakaan.
- Mereka yang putus sekolah dan memerlukan pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan atau penampilan diri dalam masyarakat. Upaya ini dikaitkan dengan keterampilan kerja dan berusaha.

Pendidikan luar sekolah sebagai penambah ini diarahkan untuk membekali para lulusan dan mereka yang putus sekolah untuk memasuki dunia kerja.

*Sebagai pengganti pendidikan sekolah*

Pendidikan luar sekolah sebagai pengganti pendidikan sekolah menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa yang karena berbagai alasan tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki satuan pendidikan sekolah, umumnya sekolah dasar. Program pendidikan ini sering diselenggarakan di daerah-daerah terpencil atau daerah yang disebut kantong terasing yang belum

memiliki sekolah dasar. Kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung dan pengetahuan praktis dan sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti pemeliharaan kesehatan lingkungan dan pemukiman, gizi keluarga, cara bercocok tanam, dan jenis-jenis keterampilan lainnya. Kegiatan ini sanya dikelola oleh lembaga-lembaga pemerintah dan badan-badan sosial yang mempunyai tugas pelayanan pada masyarakat.

Materi-materi pendidikan formal pada umumnya diseragamkan dengan standar nasional. Kurikulum lokal sebagai komponen yang dapat menjawab kebutuhan peserta didik untuk berkembang dan berkarya di lingkungannya kurang mendapat porsi jam pelajaran. Hal ini dapat dimaklumi karena tujuan pendidikan selama ini adalah untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan lulus Ujian Nasional. Kriteria keberhasilan diukur dari tingkat kelulusan siswa dalam mengikuti ujian nasional, bukan pada kecakapan siswa untuk mengisi kebutuhan lingkungannya. Tentunya, pendidikan luar sekolah sebagai bentuk pendidikan yang sedang dilegalkan oleh pemerintah, mendapat tugas untuk mengisi kekosongan tersebut melalui aplikasi kurikulum muatan lokal dalam proses pembelajarannya.

Pendidikan luar sekolah mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling mendukung antara yang satu yang lainnya. Komponen tersebut sebagai berikut: 1) Masukan sarana, (*instrumental input*) meliputi keseluruhan sumber dan fasilitas yang memungkinkan atau kelompok melakukan kegiatan belajar; 2) Masukan mentah (*raw input*) yaitu peserta didik dengan berbagai karakteristiknya; 3) Masukan lingkungan (*environmental input*), yaitu faktor lingkungannya program pendidikan; 4) Proses, menyangkut interaksi antara masukan sarana dan peserta didik (masukan mentah); 5) Keluaran, (*out put*) yaitu kuantitas lulusan yang disertai kualitas perubahan tingkah laku yang di dapat melalui kegiatan belajar membelajarkan. 6) Masukan lain (*other*) adalah daya dukung lain yang memungkinkan para peserta didik dan lulusan dapat menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk kemajuan hidupnya; dan 7) Pengaruh, (*impact*); meyangkut hasil yang dicapai peserta didik<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989), h. 50.

Dalam pelaksanaannya, PLS tetap mengacu pada tujuh komponen berikut:

*Masukan Sarana*

Masukan sarana meliputi para pengelola program, instruktur, fasilitas serta tujuan program pelatihan keterampilan. Sementara itu, Tujuan program pelatihan yaitu: 1) mempersiapkan dan membantu peserta didik/masyarakat dengan memberikan kesempatan dan kemudahan agar dapat mengembangkan potensi dan kemampuan rohani, jasmani maupun sosialnya; 2) menumbuhkan meningkatkan keterampilan kerja dalam rangka memberikan bekal untuk kehidupan dan penghidupan masa depan secara wajar.

Fungsi program pelatihan keterampilan dimaksudkan untuk menggali, mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan potensi dan sumber yang dimiliki peserta didik/masyarakat memberikan pelayanan yang bersifat bimbingan pengetahuan, teknologi, seni, sosial, dan keterampilan.

*Masukan Mentah*

Masukan mentah yaitu peserta didik yang berkala. Mereka para peserta didik dengan berbagai latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, juga menyangkut berbagai karakteristik. Karakteristik internal berupa motivasi (dorong, kebutuhan, minat, sikap dan aspirasi). Karakteristik eksternal berhubungan dengan status sosial ekonomi dan cara kebiasaan belajar.

*Masukan lingkungan*

Dalam upaya meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan terhadap penerimaan pelayanan, maka para pengelola program pelatihan keterampilan berusaha mendayagunakan semua sarana prasarana dan fasilitas yang ada, baik di lingkungan pemukiman maupun lingkungan desa. Lingkungan disini merupakan segala sesuatu yang memberi dukungan atau hambatan bagi terwujudnya potensial dari individu, untuk mengembangkan bakat, minat, aspirasi dan kreativitas.

*Proses*

Proses terdiri dari empat tahap, yaitu: 1) Tahap pendekatan awal, yang terdiri atas: (a) orientasi dan konsultasi; (b) identifikasi; (c) motivasi; (d) seleksi; 2) Tahap penerimaan: (a) registrasi; (b) penelaahan dan pengungkapan masalah (c) penempatan pada program; 3) Tahap pendidikan dan penyuluhan: (a) bimbingan pengetahuan dan teknologi tentang kesehatan lingkungan dan pemukiman; (b) bimbingan perilaku hidup sehat; (c) bimbingan

keterampilan; 4) Tahap pembinaan lanjut: (a) bimbingan peningkatan usaha; (b) bimbingan peningkatan hidup bermasyarakat.

#### *Masukan Lain*

Masukan lain pada pelatihan keterampilan ini memanfaatkan sumber-sumber di lingkungan dalam maupun luar. Untuk mendukung hal tersebut di atas, perlu adanya kerjasama yang terpadu antara berbagai pihak terkait kunci keberhasilan pendidikan keterampilan sedikit banyak terkait dengan suksesnya kerjasama dengan dunia Industri.

#### *Keluaran*

Komponen keluaran merupakan kualitas dan kuantitas peserta didik hasil pendidikan luar sekolah. Kualitas dan kuantitas yang dimaksudkan disini ditujukan pada aspek perubahan pola hidup dan perilaku hidup damai yang terjadi pada para peserta didik, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Dalam kaitan ini Warren mengemukakan bahwa pendidikan harus dapat mengembangkan kemampuan penalaran di samping keterampilan tangan, dan perhatian yang sama harus diberikan pada perkembangan peserta didik di kawasan kognitif, psikomotorik dan afektif. Pengaruh Komponen pengaruh atau dampak merupakan tujuan dari program pendidikan penyuluhan kesehatan lingkungan dan pemukiman. Penekanan utama bagi program pendidikan penyuluhan ini bagi peserta didik adalah agar mereka memiliki pengetahuan, pemahaman, perilaku hidup sehat, sehingga dengan demikian mereka dapat berperan serta dalam pembangunan, menuju masyarakat sehat sejahtera, aman sentosa<sup>13</sup>.

#### *Bentuk-bentuk kegiatan Belajar dalam PLS*

Bentuk-bentuk kegiatan belajar yang selalu dilakukan dalam PLS antara lain: 1) Belajar kelompok, 2) Magang, 3) Latihan-latihan keterampilan, 4) Lain-lain.

#### *Belajar Kelompok*

Istilah belajar kelompok sesungguhnya memberikan konotasi, bahwa kegiatan belajar dilakukan secara bersama-sama. Merupakan proses pertukaran ide dimana dua orang atau lebih mengekspresikan, menjelaskan dan mengumpulkan pengetahuan, pengalaman, pendapat dan perasaan-perasaannya<sup>14</sup>. Dalam belajar kelompok, pengalaman

---

<sup>13</sup> Djuju Sudjana, *Pendidikan Luar Sekolah: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah & Teori Pendukung dan azas*, (Bandung: Nusantara Press, 1991), h. 49-51.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 71.

belajar tidak hanya diperoleh dan berasal dari sumber belajar, melainkan terdapat pula melalui interaksi kelompok antar peserta didik itu sendiri. kegiatan belajar kelompok adalah terjalannya interaksi antara sumber belajar dengan warga belajar secara efektif.

### *Magang*

Magang merupakan salah satu kegiatan belajar yang asli dan yang paling tua. Setelah manusia mengenal perkakas, senjata, pakaian, perumahan dan bahasa maka hasrat untuk mengetahui, menguasai, dan sikap untuk memiliki benda-benda tersebut menjadi bagian dari kehidupannya. Dengan adanya hasrat itu maka pada masa lampau telah terjadi kegiatan.atau proses pemberian dan penerimaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu dari seseorang yang memiliki aspek-aspek tersebut kepada orang yang ingin memiliki aspek-aspek tersebut. Menurut Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Lembang Bandung, magang adalah proses belajar dimana seseorang memperoleh dan menguasai keterampilan dengan jalan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam bidangnya. Selanjutnya Sudjana mengemukakan: "Magang sebagai cara memberi dan menerima informasi yang telah ada dalam kehidupan manusia telah berhasil dalam menjembatani pemindahan pengalaman seseorang kepada orang lain yang belum memiliki pengalaman sehingga orang disebut terakhir itu berdiri sendiri"<sup>15</sup>. Magang yang merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar dalam pendidikan luar sekolah, dalam pelaksanaannya tidak dibatasi oleh waktu dan tempat serta mempunyai gagasan life long education sebagai konsep utama dalam pendidikan luar sekolah, serta berupaya untuk mengatasi kebutuhan masyarakat secara efisien, efektif dan relevan dengan yang dibutuhkan masyarakat<sup>16</sup>. Selanjutnya menurut Sumarna (1990), lembaga formal yang ada saat ini tak bisa diharapkan mampu mencetak tenaga kerja terampil yang sangat dibutuhkan pasar kerja, sebab kurikulum maupun sarana pendidikan formal yang digunakan umumnya sudah ketinggalan atau tak mampu mengikuti derap dunia usaha dan industri yang berkembang sangat pesat dan cepat berubah. Oleh sebab itu pendidikan luar sekolah memiliki peluang dan potensi untuk menjawab tantangan ini.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 63.

<sup>16</sup> Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1986), h. 31.

Dalam kegiatan belajar magang, terdapat unsur-unsur yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Menurut Sudjana, dalam kegiatan magang terdapat : 1) Tujuan, 2) Bahan, 3) Sumber belajar, 4) Warga belajar, 5) Sarana, 6) Tempat, 7) Waktu, dan 8) Biaya akomodasi<sup>17</sup>. Penyampaian materi pendidikan dalam latihan keterampilan, menurut Suparman, tidak cukup diberikan secara ceramah atau teori yang muluk-muluk, tetapi harus melalui latihan dan perbuatan-perbuatan dalam mengembangkan sumber daya manusia sebagai faktor produksi<sup>18</sup>.

#### *Pendidikan Luar Sekolah vs Konflik Sosial*

Fenomena konflik sosial dewasa ini menunjukkan kegagalan pendidikan formal dalam memberikan bekal kecakapan hidup kepada masyarakat. Pendidikan formal sebagai lembaga pendidikan gagal dalam mentransfer nilai-nilai pendidikan universal ke dalam pribadi peserta didik. Hal ini dikarenakan fokus pendidikan formal selama ini hanya pada materi-materi intelektual atau kognitif saja. Peserta didik dianggap berhasil jika telah mencapai standar nilai akademik tertentu dalam suatu mata pelajaran, biasa disebut dengan standar kelulusan minimal (SKM). Tujuan pendidikan yang ditetapkan Pemerintah dalam UU Sisdiknas tidak mampu dicapai secara keseluruhan, atau bahkan separoh, oleh lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Bahkan standar kompetensi yang selama ini dipropagandakan oleh pemerintah melalui UU Sisdiknas tidak mampu menyentuh aspek afektif dan perilaku peserta didik, apalagi aspek spiritual.

Minimnya perhatian pemerintah, sebagai penentu kebijakan pendidikan, dalam pengembangan moral spiritual peserta didik dapat dilihat dari tidak adanya Juknis tentang pelaksanaan pendidikan moral dalam lingkungan pendidikan. Aplikasi pendidikan moral spiritual sepenuhnya diserahkan kepada pendidik, di sisi lain pendidik juga mendapat tanggung jawab untuk mencapai SKM dalam setiap mata pelajaran yang diberikan. Integrasi nilai-nilai moral dan kearifan lokal hanya sebatas definisi operasional dalam UU Sisdiknas, dan tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah. Hal ini berbeda dengan mata pelajaran umum atau sains, pemerintah menyiapkan juknis pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi melalui Ujian Nasional. Keadaan ini tentunya membingungkan pendidik di sekolah, di satu sisi mereka dituntut untuk meningkatkan nilai SKM pada

---

<sup>17</sup> Sudjana, *Pendidikan...*, h. 63.

<sup>18</sup> Atwi Suparman, *Pendidikan Jarak Jauh*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.



mata pelajaran tertentu, dan di sisi lain mereka juga dituntut untuk dapat mengintegrasikan dan mentransfer nilai-nilai moral spiritual, tanpa juknis, kepada peserta didik. Fenomena ini semakin memperkuat asumsi bahwa pemerintah seakan mengebiri aspek moral dan spiritual peserta didik.

Walhasil, sikap pemerintah yang condong sebelah itu ditanggapi secara dramatis oleh mayoritas lembaga pendidikan dan pendidik di Nusantara ini. Maka maraklah istilah yang salah kaprah dalam dunia pendidikan, yakni Pendidikan yang berhasil adalah yang mampu meluluskan siswanya ketika Ujian Nasional, sekolah yang bonafit adalah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, terutama laboratorium; baik sains maupun bahasa, fasilitas ICT dan semisalnya. Anggapan ini semakin hari semakin kuat dan menjadi pemahaman baru yang mewarnai pendidikan di Indonesia saat ini, yang pada akhirnya membuat kesenjangan kualitas pendidikan semakin melebar.

Keadaan tersebut tidaklah salah sepenuhnya, tetapi menjadikan sarana dan prasarana menjadi satu-satunya penentu standar mutu pendidikan, tentulah kurang bijak, termasuk menjadikan sekolah sebagai satu-satunya penentu kualitas pribadi peserta didik juga tidak dapat dibenarkan. Setiap orang hidup dalam miliunya masing-masing, yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Keberhasilan pendidikan, berdasarkan pada pendapat Ki Hajar Dewantara, ditentukan oleh tiga pusat atau tripusat pendidikan<sup>19</sup>, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan<sup>20</sup> tidak akan dapat tercapai jika hanya melalui pendidikan formal di sekolah. Usaha pencapaian tersebut harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk lingkungan keluarga dan sosial. Pemerintah sebenarnya sudah menyadari hal itu, dengan diakuinya pendidikan non formal

---

<sup>19</sup> Tripusat pendidikan dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1950-an. Latar belakang teori ini adalah keanekaragaman budaya dan latar belakang sosial yang ada pada masyarakat Indonesia. Ki Hajar Dewantara memandang perlu untuk mengembangkan pendidikan tidak hanya di sekolah saja, melainkan juga di lingkungan keluarga dan masyarakat.

<sup>20</sup> Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

(PNF) sebagai jenjang pendidikan yang “dianggap” sama dengan pendidikan formal<sup>21</sup>, akan tetapi ketidakpastian kurikulum dalam pendidikan non formal membuat eksistensinya hanya sebatas pelengkap atau pengulang mata pelajaran yang tidak lulus dalam pendidikan formal.

Keistimewaan PLS yang diberikan pemerintah mestinya mendapat sambutan dari pemerintah daerah atau pihak terkait. Penentuan kurikulum dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Mata pelajaran yang diberikan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kasus ini, kurikulum yang dapat ditawarkan adalah kurikulum pendidikan anti konflik dan kekerasan. Penggunaan metode dan media pun dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, dan PLS dapat dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat, taman baca masyarakat atau di tempat-tempat yang sudah disepakati oleh pendidik dan peserta didik. Tentunya, yang lebih penting, lulusannya hendaknya juga mendapat apresiasi dan pengakuan dari pemerintah, terutama pemerintah daerah sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan PLS.

Mewujudkan generasi muda yang memiliki kecakapan intelektual, emosional dan spiritual memang bukanlah hal mudah, akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah hal mustahil. Kuncinya terletak pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan keluarga, yang tidak hanya terbatas pada kolaborasi dalam bidang finansial saja, melainkan juga kolaborasi dalam implementasi, kontrol, dan evaluasi.

## **Kesimpulan**

Pendidikan, sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

---

<sup>21</sup> Meskipun secara umum petunjuk pelaksanaan pendidikan non formal telah diatur pemerintah, namun secara teknis belum diberikan secara rinci, sehingga masih menimbulkan kebingungan dalam implementasi di lapangan, terutama penentuan mata pelajaran dan tindak lanjut program tersebut. Lihat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010.

negara. Konsep pendidikan tersebut bertujuan untuk memberikan kecakapan dalam diri peserta didik dalam bidang intelektual, mental dan spiritual. Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan formal tidak mampu mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Pendidikan formal, yang ada selama ini, hanya mampu mencapai aspek intelektual saja. Hal ini menjadi lazim, karena pemerintah mendukung penuh kegiatan tersebut, mulai dari perencanaan, kurikulum, evaluasi, bahkan standardisasi hasil pendidikan yang dilakukan melalui Ujian Nasional.

Aktifitas pembelajaran yang hanya menitikberatkan pada aspek kognitif menyebabkan kekosongan nilai dalam diri peserta didik, dan dalam kasus tertentu membuat peserta didik terjebak dalam dekadensi moral dan konflik sosial. Maraknya aksi kekerasan dalam masyarakat secara tidak langsung menggambarkan kegagalan pendidikan formal dalam menginternalisasi nilai-nilai dan norma. Maka, diperlukan sebuah format pendidikan (tidak harus baru) agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.

Pendidikan Luar Sekolah, dengan berbagai karakteristik dan keunggulannya, sebenarnya dapat menjadi alternatif solusi. PLS, yang mendapat dukungan pemerintah, seharusnya mendapat sambutan dari pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan praktik pendidikan luar sekolah. PLS dapat memasukkan unsur-unsur kearifan lokal (*local wisdom*) dalam kurikulumnya. Pelaksanaan PLS juga disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Hal ini berlaku juga pada penggunaan media dan metode. Jika merujuk pada kondisi tersebut, maka (seharusnya) PLS dapat menjadi solusi atas dekadensi moral, konflik sosial dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Adikusumo, Soepardjo. 1986. *Pendidikan Kemasyarakatan*. Bandung: FPS-IKIP.
- <http://www.bit.lipi.go.id/masyarakat-literasi/index.php/minat-baca/74-peran-pendidikan-luar-sekolah-dalam-pembangunan-sdm-dan-pemasyarakatan-budaya-baca>
- Joesoef, Soelaiman *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1986.
- Ocorandi, Michael. 1998. "An Anatomy of The Recent Anti Ethnic-Chinese Riots in Indonesia", <http://www.huaren.org/focus/id/032598-1.html>.
- Snyder, Jack, 2000. *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*, W.W. Norton & Company, New York, London.
- Sudjana, Djuju. *Pendidikan Luar Sekolah: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah & Teori Pendukung dan azas*, (Bandung: Nusantra Press, 1991), hal. 49-51.
- Sudjana, Nana. 1989. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_ 1989. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Suparman, Atwi. 1990. *Pendidikan Jarak Jauh*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syamsi, Ibnu. 2010. "Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Pemberdaya dalam Masyarakat" dalam *DIKLUS; Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, vol. 14 No. 1. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tadjoeddin, Mohammad Zulfan. 2002. *Anatomi Kekerasan Sosial Dalam Konteks Transisi: Kasus Indonesia 1990-2001*, Jakarta: UNSFIR.
- Tilaar, H.A.R. 2005, *Manifesto Pendidikan Nasional; Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.